

K.H. Yusuf Taziri: Kiai Nasionalis dari Cipari Tahun 1934-1953

Irfan Ahmad Fauzi^{1*}, Rahayu Hardita Dwi Widyanti²

¹Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia

²Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia

*e-mail korespondensi: r.hardita90@gmail.com

Received 12 May 2023; Received in revised form 24 May 2023; Accepted 27 May 2023

Abstrak

Kajian mengenai Nasionalisme Kiai menjadi salah satu topik yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Islam dan Nasionalisme di Indonesia seringkali dibenturkan dalam perjalanan politik bangsa Indonesia. Padahal, keberadaan Islam tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, kiai dan santrinya menjadi kelompok yang senantiasa melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode historis yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Sebagai tulisan sejarah, tulisan ini menggunakan surat kabar sezaman sebagai sumber primer. Tulisan ini menggambarkan bagaimana nasionalisme tumbuh dalam diri K.H. Yusuf Taziri yang merupakan salah seorang kiai lokal yang berhadapan langsung dengan DI/TII yang merupakan sebuah gerakan perlawanan berlandaskan Islam pada periode revolusi di Indonesia.

Kata kunci: yusuf taziri, kartosuwiryo, pesantren darussalam, pesantren cipari.

Abstract

The study of Kiai Nationalism is an interesting topic for further research. Islam and nationalism in Indonesia often collide in the course of the Indonesian nation's politics. Whereas the existence of Islam cannot be separated from the struggle of the Indonesian nation in achieving independence. Since the Dutch colonial era, the kiai and their students have been a group that has always fought against the Dutch colonial government. This paper is written using the historical method which consists of heuristics, verification, interpretation and historiography. As historical writing, this paper uses contemporary newspapers as the primary source. This paper describes how nationalism grows in K.H. Yusuf Taziri, was a local kiai who was in direct contact with DI/TII, which was a resistance movement based on Islam during the revolutionary period in Indonesia.

Keywords: yusuf taziri, kartosuwiryo, pesantren darussalam, pesantren cipari.

PENDAHULUAN

Topik mengenai peran ulama di Indonesia menjadi salah satu topik yang menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan hubungan yang telah lama terjalin antara umat Islam dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, ulama dan kiai memiliki peran yang signifikan dalam perubahan sosial yang

terjadi di Indonesia. Kehadiran ulama dan kiai berkaitan erat dengan kehadiran pesantren sebagai media pendidikan kaum santri. Kiai merupakan salah satu elemen dasar dari tradisi pesantren, pertumbuhan pesantren bergantung kepada kemampuan pribadi Kiainya (Dhofier, 1994).

Menurut Pradjarta Dirdjosanjoto (Dirdjosanjoto, 1999) yang membagi Kiai

ke dalam tiga kelompok; Kiai Pesantren, kiai Langgar dan kiai tarekat, kiai pesantren merupakan Kiai supralocal yang memiliki santri dan pengikut dari berbagai tempat. Kewibawaan dan otoritasnya dipengaruhi oleh penerimaan dan pengakuan lingkungannya (masyarakat). Penggambaran Kiai sebagai tokoh kunci dalam masyarakat tempat di mana dia tinggal, menjadi jawaban mengenai besarnya pengaruh Kiai terhadap perubahan sebuah masyarakat.

K.H. Saifudin Zuhri (Untung, 2018) menegaskan keterikatan antara kiai, pesantren, dan perubahan sosial terlihat dominan sejak abad ke-20. Di abad ke-20, kehadiran pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama, tapi juga sebagai tempat penanaman nilai-nilai nasionalisme (paham kebangsaan). Menurut Baso (Baso, 2010), pesantren memainkan peranan yang strategis dalam gerakan kebangsaan ketika organisasi pergerakan kebangsaan banyak dibubarkan. Meskipun terlihat lebih halus dalam bertindak daripada organisasi pergerakan kebangsaan, pesantren tetap menjadi tempat yang paling diawasi oleh Pemerintah Belanda. Beberapa kiai yang aktif dalam gerakan kebangsaan atau dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat mengalami penangkapan, pengasingan, dan larangan mengajar selama beberapa tahun.

Penangkapan para kiai dan ulama yang terlibat dalam organisasi dan gerakan kebangsaan terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di kota Garut. Garut adalah sebuah kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun pergerakan Islam di kota Garut mulai terlihat sejak abad ke-18. Kehadiran Zaenal Abidin yang merupakan seorang ulama membawa perubahan besar terhadap kota Garut, terutama daerah Cipari. Zaenal Abidin yang menikah dengan gadis setempat dan memiliki beberapa anak nantinya membentuk jaringan komunal dan pesantren di Cipari (Imadudin, 2010).

K.H. Yusuf Taziri merupakan salah satu keturunan Zainal Abidin yang dikenal sebagai tokoh pergerakan kebangsaan. Ayah dari Yusuf Taziri, K.H. Harmaen diketahui merupakan salah seorang aktivis PSII yang sempat mengalami penangkapan oleh Belanda (Horikoshi, 1987). Dilahirkan dalam keluarga ulama dan pesantren yang nasionalis menjadikan Yusuf Taziri memiliki semangat dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut pula yang mendekatkan K.H. Yusuf Taziri dengan sosok Kartosuwirjo pemimpin DI/TII.

Semangat nasionalisme yang dimiliki oleh K.H. Yusuf Taziri menjadi suatu hal yang menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai bagaimana perjuangan K.H.

Yusuf Tazuri dalam membuktikan nasionalismenya sepanjang tahun 1934-1970. Pengambilan tahun 1934 merujuk kepada tahun awal bergabungnya Yusuf Tazuri dengan Partai Sarekat Islam Indonesia yang menandai awal mula perjuangan K.H. Yusuf Tazuri di bidang politik, sedangkan pengambilan tahun 1953, merujuk kepada tahun ketika K.H. Yusuf Tazuri memilih untuk bergabung dengan Divisi Siliwangi yang bertugas di Jawa Barat.

METODE

Dalam menulis penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Gosttchlak (Gottschalk, 2015), metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Gottschalk menjelaskan pengertian metode sejarah sebagai suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan agar peristiwa yang terjadi di masa lampau dapat direkonstruksi secara imajinatif.

Menurut Kuntowijoyo (Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, 2003), penelitian sejarah terbagi dalam empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahapan yang pertama adalah tahapan pengumpulan sumber atau disebut heuristik. Peneliti memulai tahapan heuristik dari Perpustakaan Batu Api. Perpustakaan ini memberikan informasi cukup banyak mengenai sumber

yang menunjang berkaitan dengan Yusuf Tazuri dan gerakan pesantren.

Setelah peneliti melakukan proses heuristik, selanjutnya sumber yang telah peneliti dapatkan, kemudian peneliti kritik. Kritik ada dua macam, yaitu kritik internal dan eksternal. Setelah sumber yang peneliti dapatkan tersebut dikritik, maka sumber tersebut harus dikolaborasikan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain sehingga melahirkan sebuah fakta sejarah yang mendekati kebenaran.

Tahapan ketiga dari metode sejarah yang peneliti lakukan yaitu interpretasi, dalam tahapan ini fakta-fakta tersebut dirangkaikan menjadi suatu rentetan tak terputus dari suatu peristiwa. Dari data yang peneliti dapatkan, peneliti melakukan interpretasi. Peneliti mencoba untuk melakukan analisis dan sintesis dari setiap data yang peneliti dapatkan, sehingga menjadi sebuah rangkaian yang tidak terputus dari peristiwa yang ada dan menjadi gambaran utuh dari penelitian yang peneliti lakukan.

Tahapan keempat dalam metode sejarah adalah historiografi. Historiografi merupakan tahapan terakhir dalam metode sejarah. Peneliti menuangkan dengan bahasa yang tepat supaya dapat dipahami dan penelitian berdasarkan fakta sebagaimana didapatkan dari hasil heuristik dan kritik yang dilakukan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akar Nasionalisme K.H. Yusuf Taziri

Kahin (Kahin, 2013) melihat Boedi Oetomo sebagai awal pijakan bangkitnya nasionalisme di Indonesia, namun peran Islam sebagai salah satu faktor dominan yang mendorong berkembangnya nasionalisme di Indonesia tidak dapat dilewatkan begitu saja. Meskipun Kuntowijoyo melihat negara dan negara merupakan dua institusi yang berbeda, namun keduanya dapat saling bersinergi untuk menciptakan stabilitas sosial politik di Indonesia (Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, 1997).

Keterikatan kiai, pesantren dengan gerakan nasionalisme seringkali dikaitkan dengan “Resolusi Jihad” 22 Oktober 1945. Resolusi Jihad merupakan seruan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh K.H. Hasyim Asy’ari mewakili ulama dan kiai dari Jawa Timur. Peristiwa tersebut memiliki dampak yang luar biasa terhadap kebangkitan laskar Islam di berbagai wilayah di Indonesia (Saputra, 2019). Namun, jauh sebelum Resolusi Jihad dikumandangkan, di Garut telah muncul seorang Kiai yang dikenal oleh warganya sebagai sosok nasionalis, Kiai tersebut bernama K.H. Yusuf Taziri.

K.H. Yusuf Taziri dikenal sebagai ulama yang memiliki pengaruh besar di daerah Wanaraja, Cipari. Kampung Cipari merupakan kampung yang memiliki catatan sejarah yang panjang di kota

Garut. Kampung yang terletak di desa Sukarasa tersebut didirikan oleh Zainal Abidin pada abad ke-18. Zainal Abidin yang dikenal dengan sebutan Mbah Bungsu merupakan seorang ulama keturunan dari raja setempat bernama Ayan Permana Prabu Kunciung Putih. Zainal Abidin yang tumbuh sebagai ulama kemudian menikah dengan Miah, seorang gadis lokal dan memiliki empat orang anak. Anaknya yang termuda, Haji Samsuddin meneruskan jejaknya menjadi seorang ulama sekaligus kiai pemimpin pesantren. Haji Samsuddin memiliki empat orang Istri dengan tiga belas anak, dua anaknya yang terkenal di Cipari adalah Haji Hasan dan Haji Haramaen yang merupakan ayah dari K.H. Yusuf Taziri (Zada, 2017).

Yusuf Taziri muda tumbuh di tengah derasnya arus gerakan kebangsaan di Hindia Belanda. Bangkitnya gerakan nasionalisme di Hindia Belanda tidak hanya mewarnai organisasi-organisasi pergerakan, namun turut pula mewarnai kaum santri. Pada tahun 1930-an, pesantren bertransformasi dari lembaga pendidikan keagamaan menjadi tempat penanaman nilai-nilai kebangsaan. Kesadaran bahwa pemerintahan kolonial adalah pemerintahan kafir yang menjajah agama dan bangsa mereka, semakin mendalam tertanam di benak para santri. Pesantren yang merupakan pusat pendidikan Islam pada saat itu mengambil sikap anti Belanda, sampai

uang gaji yang diterima oleh pegawai pemerintahan kolonial dianggap sebagai uang haram (Suminto, 1985).

Sikap konfrontasi yang ditunjukkan oleh kaum santri terhadap pemerintah kolonial tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi juga terjadi di kota-kota kecil seperti Garut. Peristiwa yang dikenal dengan nama Geger Garut ini terjadi pada tahun 1919 pada masa kepemimpinan R.A.A. Soeria Kertalegawa. Pasca Perang Dunia I, perekonomian dunia mengalami krisis ekonomi, harga-harga bahan kebutuhan pokok melonjak naik, hal ini berdampak kepada kehidupan kaum pribumi di Hindia Belanda.

Krisis ekonomi yang melanda Hindia Belanda diperparah dengan gagal panen akibat kemarau panjang yang terjadi di sepanjang tahun 1918-1919 di Garut. Kemudian untuk mengatasi kelangkaan beras, Pemerintah Garut mengeluarkan kebijakan wajib menjual padi kepada pemerintah dengan ketentuan; bagi petani yang memiliki sawah seluas *lima bau* atau lebih diwajibkan menjual padinya sebanyak empat pikul dari setiap *bau*, hanya bagi petani yang memiliki tanah kurang dari setengah *bau*, dibebaskan dari kewajiban menjual padinya (Darmansyah, 2018).

Aksi penolakan terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Garut tersebut pertama kali dilakukan oleh Haji Hasan. Haji Hasan yang memiliki *sepuluh*

bau sawah diwajibkan menjual sebanyak 42 pikul padi dengan harga f4,- per pikul, sedangkan harga padi di pasaran sudah mencapai f7.50,- per pikul. Kebijakan tersebut dinilai memberatkan, bukan hanya bagi penduduk setempat, tapi juga bagi Haji Hasan yang harus menanggung 84 orang anggota keluarganya (Noer, 1973).

Peristiwa yang diawali dengan penolakan Haji Hasan terhadap kebijakan Pemerintah Garut yang mewajibkan penjualan padi kepada pemerintah, berujung kepada pengepungan rumah keluarga Haji Hasan dan pengikutnya oleh 27 orang polisi. Aksi penolakan yang dilakukan oleh Haji Hasan dan pengikutnya dianggap sebagai sebuah tindakan pembangkangan terhadap pemerintah, sehingga pemerintah merasa tindakannya yang menewaskan Haji Hasan dan beberapa pengikutnya dianggap sebagai sebuah langkah yang tepat dalam upaya menegakkan wibawa pemerintah di mata kaum pribumi (Sumatera-Bode, De Garoet Affaire, 1919), (Nederlandsch-Indie, 1919).

Suminto (Suminto, 1985) melihat peristiwa berdarah yang terjadi di desa Cikendal kawedanan Leles kabupaten Garut pada tanggal 7 Juli 1919 sebagai bentuk ketakutan berlebihan yang ditunjukkan oleh Belanda terhadap umat Islam. Peristiwa yang juga dikenal dengan nama peristiwa Cimareme 1919 ini dianggap sebagai tonggak awal tindakan

represif pemerintah kolonial Belanda terhadap gerakan Islam Politik di Hindia Belanda.

Ketakutan Belanda terhadap gerakan politik Islam di Indonesia kemudian diperlihatkan dalam berita-berita yang ditulis oleh surat kabar yang terbit sepanjang tahun 1919-1921. Dalam laporan investigasi yang dilakukan oleh Belanda, alasan yang menjadi pemicu terjadinya peristiwa berdarah tersebut bukan lagi penolakan terhadap kebijakan penjualan padi yang dianggap merugikan rakyat, namun keterlibatan Sarekat Islam dan adanya upaya kelompok Haji Hasan dan Sarekat Islam untuk menggulingkan pemerintahan. Kedekatan Haji Hasan dengan Sarekat Islam dianggap sebagai pembenaran terhadap asumsi yang beredar selama ini (Sumatera-Bode, De Leles-Zaak, 1920), (Nieuwsblaad, 1919).

Peristiwa Geger Garut yang terjadi di Cikendal ikut berpengaruh terhadap Pesantren Cipari. Sebagai adik dari Haji Hasan, Haji Harmaen (Harmain) merasakan dampak langsung dari peristiwa tersebut. Meskipun tidak terlibat secara langsung dengan peristiwa Geger Garut, kedekatan antara keluarga pesantren Cipari dengan tokoh Sarekat Islam menjadikan Pesantren Cipari mendapat pengawasan lebih oleh Pemerintah Belanda. Kedekatan di antara pesantren Cipari dengan Sarekat Islam dibuktikan dengan seringnya H.O.S.

Tjokroaminoto datang ke Cipari (Horikoshi, 1987), (Zada, 2017).

Iklim gerakan Politik Islam yang mewarnai Cipari tentunya turut membantu tumbuh dan berkembangnya semangat nasionalisme dalam diri K.H. Yusuf Taziri muda. Hal ini terlihat dari bergabungnya Yusuf Taziri dalam Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) sebagai salah satu dari empat Dewan Pengurus PSII Garut, sebuah organisasi politik berhaluan Islam nasionalis di tahun 1930-an (Horikoshi, 1987).

K.H. Yusuf Taziri muda tumbuh menjadi salah satu ulama karismatik dari Garut. K.H. Yusuf Taziri mendapatkan pendidikan pertamanya dari pamannya, pemimpin pesantren Cilame K.H. Ba'ali. K.H. Yusuf Taziri juga diketahui pernah berguru dengan K.H. Sanusi dari Sukabumi yang dikenal sering bertentangan dengan pemerintah Kolonial. Selanjutnya, K.H. Yusuf Taziri melanjutkan pendidikannya ke Cirebon, Buntet, Uyubek, Leles dan Suralaya. Hal ini yang mendorong K.H. Yusuf Taziri tumbuh menjadi ulama yang memiliki nasionalisme dan kecintaan kepada tanah air yang tinggi (Zada, 2017).

B. Nasionalisme K.H. Yusuf Taziri 1934-1953.

Bergabung dengan PSII

Soekiman Wirosandjoyo, salah seorang tokoh muda Sarekat Islam mengatakan bahwa pada dasarnya Sarekat Islam

adalah suatu organisasi pergerakan yang berlandaskan Islam tetapi lebih mengutamakan kebangsaan (Widuatie, 2015). Kehadiran Sarekat Islam di Kota Garut dibawa langsung oleh H.O.S. Cokroaminoto pada tahun 1914 yang pada saat itu sedang berguru kepada Kiai Abbas dari Tanggulun, Garut. Kedatangan Cokroaminoto ke Garut mengundang ketertarikan masyarakat di kota Garut untuk bergabung dengan Sarekat Islam, hal tersebut menjadikan Garut sebagai salah satu lumbung simpatisan terbanyak Sarekat Islam di Jawa Barat (Harisma, 2021)

Keterlibatan keluarga K.H. Yusuf Tausiri dengan Sarekat Islam telah diketahui terjalin sejak lama. Dalam peristiwa Garoet Affair atau Peristiwa Cimamere 1919, H. Harmaen yang merupakan ayah dari K.H. Yusuf Tausiri tercatat sebagai anggota Sarekat Islam. Surat Kabar *De Preanger-Bode* mencatat bahwa pada tanggal 3 Juli, sekitar 100 orang yang berkumpul di masjid Cipari milik Haji Harmaen untuk mempersiapkan perang sabil melawan Pemerintah Kolonial Belanda, dan seluruh orang yang hadir merupakan anggota dari Sarekat Islam Afdeeling B (Preanger-Bode, 1920), (Vorstenlanden, 1920).

Masjid sederhana yang berada di dalam lingkungan Pesantren ini pada dasarnya bernama masjid As-syuro, namun dalam kesehariannya, masjid ini lebih dikenal sebagai dengan nama

masjid Cipari. Pada tahun 1933, kepemimpinan pesantren beralih kepada K.H. Yusuf Tausiri. Meskipun tidak terlibat secara langsung dengan peristiwa Cimamere, K.H. Yusuf Tausiri telah dikenal sebagai salah seorang tokoh pergerakan dari kota Garut. Hal ini terlihat dari aktivitas politik yang kembali bangkit setelah sempat mati di Cipari. Pada masa pergerakan, masjid Cipari banyak digunakan sebagai tempat rapat organisasi-organisasi Islam (Imadudin, 2010).

Meskipun interaksi antara keluarga Pesantren Daroessalam Cipari dengan Sarekat Islam telah diketahui sejak lama, namun aktivitas Politik K.H. Yusuf Tausiri justru baru terlihat di tahun 1930'an, yang ditandai dengan bergabungnya K.H. Yusuf Tausiri dengan Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII). Pada tahun 1934, K.H. Yusuf Tausiri tercatat sebagai salah satu dari empat anggota dewan partai PSII. Kehadiran K.H. Yusuf Tausiri yang merupakan salah satu tokoh besar di Cipari dengan aktivitas politiknya menarik perhatian dari Belanda yang mengkhawatirkan peristiwa Cimamere kembali terulang (Rahmawati, 2021).

Pada tahun 1939, K.H. Yusuf Tausiri memutuskan untuk keluar dari semua aktivitas politiknya termasuk PSII dan memilih fokus membesarkan Pesantren Daroessalam. Bersamaan dengan hal tersebut, pada tahun 1940-an, aktivitas PSII yang sempat menjadi motor

pergerakan kaum Islam Nasionalis pada awal tahun 1920-an justru mengalami kemunduran. PSII tidak lagi menjadi suara yang diperhitungkan di Hindia Belanda (Benda, 1980).

K.H. Yusuf Tausiri Mempertahankan Keutuhan NKRI

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi secara tiba-tiba tidak hanya membawa euforia kemenangan dan kebebasan saja, namun juga konflik yang terjadi di berbagai daerah. Setelah tersiar kabar mengenai kemerdekaan Indonesia. Keempat penguasa kerajaan di Jawa segera menyatakan dukungan kepada Pemerintahan Republik Indonesia yang baru terbentuk. Namun, respon berbeda ditunjukkan oleh raja-raja kecil di luar Jawa yang telah lama menjadi pendukung Belanda, raja-raja tersebut cenderung bersikap apatis bahkan menolak pemerintahan yang baru saja terbentuk di Jakarta. Perbedaan sikap tersebut mendorong lahirnya revolusi sosial di berbagai daerah (Ricklefs, 1998).

Perbedaan respon terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak hanya terjadi di tingkat lokal saja, tetapi juga terjadi di tingkat nasional. Hal tersebut terjadi sepanjang periode revolusi Indonesia 1945-1949. Sebagai sebuah pemerintahan yang baru saja terbentuk, tantangan Pemerintah Republik Indonesia tidak hanya menghadapi Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali Indonesia, namun

juga pemberontakan di berbagai daerah. Ketidakuasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah Indonesia menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan perlawanan di berbagai daerah.

Menurut Kahin (Kahin, 2013), salah satu peristiwa yang mendorong lahirnya pemberontakan di Indonesia adalah Perjanjian Renville. Penandatanganan perjanjian Renville menimbulkan suatu krisis kabinet dalam Republik. Isi perjanjian Renville yang menyatakan bahwa Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogjakarta, dan Sumatera dianggap lebih banyak merugikan bangsa Indonesia. Salah satu dampak dari penandatanganan perjanjian Renville adalah munculnya kekecewaan dari tokoh pergerakan Islam seperti Kartosuwiryo. Menurut Kartosuwiryo, TNI bukan hijrah dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah, tapi justru meninggalkan Jawa Barat (Suparjan, 2021).

Kartosuwiryo merupakan salah seorang tokoh pergerakan Islam yang bersikeras mendirikan sebuah Negara Islam di Indonesia. Menurut Itbah Baihaki (Baihaki, 2019), sebelum Indonesia merdeka, keputusan untuk mendirikan negara Islam telah diambil oleh Kartosuwiryo dalam sidang Komite Pembela Kebenaran Partai Serikat Islam Indonesia pada bulan maret 1940 di Malangbong, sehingga penandatanganan perjanjian Renville tidak hanya memberikan kekecewaan pada diri

Kartosowirjo, namun juga membuka peluang untuk mewujudkan sebuah negara Islam di wilayah Indonesia.

Sebagai tokoh pergerakan Islam, Kartosowirjo justru tidak berasal dari kalangan pesantren. Pemikiran Kartosowirjo mengenai negara Islam justru banyak dipengaruhi oleh H.O.S. Cokroaminoto yang merupakan salah seorang tokoh berpengaruh di Sarekat Islam. Sama seperti Soekarno, Kartosowirjo merupakan salah satu murid H.O.S. Cokroaminoto yang tinggal dan mondok di Rumah Cokroaminoto. Kedekatan antara guru dan murid ini dibuktikan dengan penggunaan Politik Hijrah sebagai strategi politiknya ketika aktif di PSII (Awwas, 1999). Perpindahan Kartosowirjo ke Jawa Barat ini yang menjadi pintu pembuka interaksi antara Kartosowirjo dengan Kiai-kiai lokal seperti K.H. Yusuf Tausiri dan K.H. Ardi Wisastro yang kemudian menjadi mertuanya (Baihaki, 2019).

Hubungan baik yang terjalin antara Kartosowirjo dengan K.H. Yusuf Tausiri terlihat renggang memasuki tahun 1939, ketika K.H. Yusuf Tausiri memilih untuk mundur dari aktivitasnya sebagai aktivis partai politik menjadi pemimpin gerakan sosial keagamaan. Memasuki masa pemerintahan Jepang, ketika Kartosowirjo aktif sebagai sekretaris Masyumi, K.H. Yusuf Tausiri memilih menjadi komandan Hizbullah (organisasi militer Islam) di Wanaraja dan

menjadikannya sebagai tempat latihan militer (Zada, 2017).

Perjanjian Renville yang mewajibkan tentara dan laskar untuk mengosongkan Jawa Barat, mempertemukan kembali K.H. Yusuf Tausiri dengan Kartosowirjo yang pada saat itu telah mendirikan Darul Islam (DI). Sebagai pemimpin dari Hizbullah, K.H. Yusuf Tausiri melihat hal ini sebagai peluang baginya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pada awal pembentukannya, DI mendapat dukungan penuh dari K.H. Yusuf Tausiri. Namun Kartosowirjo melihat perjanjian Renville dari sudut pandang yang berbeda. Perjanjian Renville dilihatnya sebagai peluang untuk mewujudkan Negara Islam Indonesia (NII) yang telah dirancang sejak tahun 1940.

Perbedaan sudut pandang ini yang menyebabkan K.H. Yusuf Tausiri menarik dukungannya terhadap DI dan Kartosowirjo. K.H. Yusuf Tausiri kemudian menolak ajakan Kartosowirjo untuk mendeklarasikan berdirinya NII pada tahun 1948 dan memilih menjadikan laskar-laskar yang tergabung dalam Darussalam, Hizbullah dan Sabilillah menjadi kantung-kantung perlawanan terhadap Belanda di Jawa Barat. Memburuknya hubungan antara K.H. Yusuf Tausiri dengan Kartosowirjo mengakibatkan terjadinya penyerangan Pesantren Daroessalam Cipari oleh

Kartosuwiryo dan pasukan Tentara Islam Indonesia (TII) (Asnanto, 2019).

Sejak terjadi peristiwa Agresi Militer Belanda II, Kartosuwiryo telah mengklaim wilayah Jawa Barat sebagai daerah kekuasaan NII. Bagi Kartosuwiryo, kembalinya tentara Divisi Siliwangi ke wilayah Jawa Barat merupakan sebuah upaya pelanggaran terhadap kedaulatan NII. Hal ini mengakibatkan terjadi bentrokan antara TII dengan Pasukan Divisi Siliwangi di beberapa tempat. Di Garut, Pasukan DI/TII terpusat di beberapa daerah pedalaman seperti Gunung Guntur, Leles, Balubur Limbangan, Cibatu, Malangbong dan sekitar Gunung Cikuray. Daerah ini disebut sebagai daerah *Suffah*, daerah yang telah disucikan dari musuh (Imadudin, 2010).

Kontak senjata antara DI/TII dengan pasukan Mayor Rivai terjadi pada tanggal 25 Januari 1949 di Antralina Malangbong Garut (Peristiwa ini dikenal dengan Peristiwa Antralina). Dua hari kemudian, Kartosuwiryo memberikan ultimatum kepada Pesantren Darussalam untuk segera menentukan sikap, mendukung DI atau RI. Menghadapi ultimatum tersebut, K.H. Yusuf Tausiri memilih jalan diplomasi, yaitu dengan mengajak berunding para utusan Kartosuwiryo untuk berunding di rumah Hj. Muthi'ah. Dalam perundingan ini, K.H. Yusuf Tausiri menasehati para pendukung Kartosuwiryo bahwa langkah mendirikan NII bukan lah

langkah yang tepat untuk dilakukan saat ini (Dengel, 1995).

Upaya yang dilakukan oleh K.H. Yusuf Tausiri dalam mengembalikan para pengikut DI/TII ke dalam pangkuan Indonesia mendapat sambutan yang baik dari Pemerintah RI. Pada tanggal 30 Januari 1949, Mayor Rivai mendatangi langsung Pesantren Darussalam, Cipari. Hal tersebut mengundang kemarahan Kartosuwiryo. Kecewaannya terhadap K.H. Yusuf Tausiri yang tidak mau mendukung perjuangan DI/TII dibuktikan dengan penyerangan pasukan DI/TII ke Pesantren Darussalam Cipari sepanjang tahun 1949-1958. Menurut Horikoshi (Horikoshi, 1987), penyerangan ini terjadi sebanyak 50 kali, namun yang terbesar terjadi pada tanggal 17 April 1952 dan 5 Agustus 1952.

Hiroko Horikoshi (Horikoshi, 1987) menjelaskan dalam bukunya, bahwa peristiwa pertempuran antara Pesantren Cipari yang dipimpin oleh K.H. Yusuf Tausiri dengan pihak DI/TII yang terjadi pada tanggal 17 April 1952 berlangsung sampai pukul tiga pagi bahkan menjelang subuh. Ada sekitar 3.000 orang pasukan DI/TII yang datang menyerang pesantren Cipari. Pasukan DI/TII masuk melalui pertigaan Jalan Raya Cibatu menuju Desa Cimaragas. Dalam perjalanannya menuju Desa Cipari, pasukan DI/TII membakar rumah-rumah penduduk yang dilaluinya, dan selama penyerangan berlangsung, K.H. Yusuf Tausiri memimpin perlawanan

masyarakat Cipari dari Menara masjid, sedangkan penduduk Desa Cipari mengungsi ke madrasah dan masjid Pesantren Cipari.

Penyerangan besar kembali terjadi pada tanggal 5 Agustus 1952. Dalam penyerangan ini, 24 orang dikabarkan meninggal, 23 orang luka-luka, dan 58 rumah warga dibakar dari 24 orang yang dikabarkan meninggal, 15 orang merupakan pasukan DI/TII, sedangkan sisanya sebanyak 9 orang merupakan warga Cipari. Dalam penyerangan kali ini, pasukan DI/TII membawa sebanyak 1.500 pasukan, namun tidak juga berhasil membunuh K.H. Yusuf Tausiri sebagai pimpinan kampung Cipari (De Preangerbode, 1952).

Penyerangan besar-besaran yang dilakukan oleh DI/TII terhadap Desa Cipari dan K.H. Yusuf Tausiri mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia. Laskar Darussalam dari Cipari bekerjasama dengan TNI Divisi Siliwangi membentuk Operasi Pagar Betis. Operasi Pagar Betis adalah sebuah taktik mengisolasi DI/TII. Dalam Operasi ini, Jawa Barat dibagi ke dalam tiga wilayah; A (daerah yang telah bebas dari DI/TII), B (Daerah yang meskipun masih sering diganggu DI/TII, namun telah dikuasai TNI), dan C (daerah yang masih berada dalam kekuasaan DI/TII) (De Locomotif, 1953). Dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, K.H. Yusuf Tausiri bahkan mengirimkan laskar Darussalam

untuk membantu TNI menghalau DI/TII ke berbagai wilayah di Jawa Barat, dan perjuangan K.H. Yusuf Tausiri tersebut mendapatkan apresiasi dan dukungan dari Pemerintah Indonesia (Java Bode, 1953).

Setelah berhasil memadamkan DI/TII di Garut, K.H. Yusuf Tausiri memilih untuk bergabung dengan Divisi Siliwangi sebagai tim penguat Rohani. K.H. Yusuf Tausiri juga aktif dalam Dewan Nasional sebagai wakil Propinsi dari Golkar (Golongan Karya) sepanjang tahun 1963-1965.

PENUTUP

Bangkitnya nasionalisme di Indonesia ditandai dengan kelahiran Boedi Oetomo. Namun keberadaan Islam sebagai salah satu faktor pendorong masifnya gerakan nasionalisme di Indonesia tidak dapat diabaikan. Peran Kiai dan ulama dengan pesantren yang dimilikinya begitu besar dalam melahirkan perlawanan terhadap Pemerintah Belanda di berbagai daerah. Keterikatan antara Islam dan nasionalisme ditunjukkan oleh K.H. Yusuf Tausiri, sosok Kiai Nasionalis yang berasal dari Cipari, Garut Jawa Barat. Semangat dan kecintaan K.H. Yusuf Tausiri terhadap tanah kelahirannya tidak hadir begitu saja, namun berasal dari Pendidikan kedua orang tua dan iklim tempat K.H. Yusuf Tausiri tumbuh besar. K.H. Yusuf Tausiri berasal dari keluarga ulama yang dikenal oleh masyarakat kota Garut sebagai keluarga yang seringkali melakukan perlawanan

terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang dianggap merugikan rakyat. Salah satu peristiwa perlawanan keluarga K.H. Yusuf Taziri yang tercatat oleh sejarah adalah peristiwa Cimareme 1919 yang menelan korban jiwa. Pendidikan nasionalisme yang diterima oleh K.H. Yusuf Taziri dari keluarganya kemudian dipraktekkan dalam kegiatan politiknya, baik ketika masa pemerintahan Belanda maupun pada masa pendudukan Jepang. Nasionalisme K.H. Yusuf Taziri kemudian juga dibuktikan dengan perjuangannya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. K.H. Yusuf Taziri berhadapan langsung dengan sahabat-sahabatnya yang bergabung dalam DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnanto, G. (2019, July). Gerakan Darul Islam : Catatan Kecil dari Pengalaman Sejarah. *SIASAT Journal of Social, Cultural and Political Studies*, 4 (3), 59-66.
- Awwas, I. S. (1999). *Menelusuri Perjalanan Jihad S.M. Kartosuwiryo Proklamator Negara Islam Indonesia*. Jogjakarta: CV. Adipura.
- Baihaki, A. I. (2019, September). Peran Kartosoewirjo Dalam Pembentukan Negara Islam Indonesia 1947-1962. *Qurthuba : The Journal Of History and Islamic Civilization*, 3, No.4, 1-23.
- Baso, A. (2010). *Pesantren Studies*. Jakarta: Pustaka Afid.
- Benda, H. J. (1980). *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit : Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Burhanudin, J. (2012). *Ulama dan Kekuasaan : Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: Mizan.
- Darmansyah, M. (2018, Agustus). Garut Era Kepemimpinan Bupati R.A.A. Soeria Kertalegawa (1915-1929). *Jurnal Renaissance*, 3, No. 02, 374-382.
- De Locomotif. (1953, Oktober 16). Geen Vrede Modelijk met Kartosuwirjo.
- De Preangerbode. (1952, Agustus 7). 15 Teroristen Gedood : DI = bendentot aftocht gedwongen.
- Dengel, H. H. (1995). *Darul Islam dan Kartosuwiryo : Langkah Perwujudan Angan-angan Yang Gagal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dhofier, Z. (1994). *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Dirdjosanjoto, P. (1999). *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. Jogjakarta: LKiS.
- Gottschalk, L. (2015). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI-Press.
- Harisma, H. (2021). *Pendidikan Politik Partai Syarikat Islam Indonesia Cabang Kabupaten Garut Pada Tahun 1959-1965*. Tasikmalaya: Skripsi, Universitas Siliwangi.
- Horikoshi, H. (1987). *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Imadudin, I. (2010, Maret). Peranan Kiai dan Pesantren Cipari Garut Menghadapi DI/TII (1948-1962). *Patanjala*, 2, No.1, 48-65.
- Java Bode. (1953, Oktober 15). Kijai Taudjiri over D.I.
- Kahin, G. M. (2013). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kuntowijoyo. (1997). *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Jogjakarta: Tiara Wacana.

- Lubis, N. H. (2011). *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Nederlandsch-Indie, H. N. (1919, Juli 9). De Beweging in Het Garoetsche. *Het Nieuws Van Den Dag Voor Nederlandsch-Indie*.
- Nieuwsblaad, B. (1919, November 19). Het Garoet Rapport. *Bataviaasch Nieuwsblaad*.
- Noer, D. (1973). *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 199-1942*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Preanger-Bode, D. (1920, Februari 25). De Tjimareme-zaak .
- Rahmawati, G. S. (2021). *Peranan Pesantren Cipari Di Bawah Pimpinan K.H. Yusuf Tausiri Dalam Penumpasan DI/TII di Desa Sukarasa Kecamatan Pangantikan Kabupaten Garut Pada Tahun 1962*. Tasikmalaya: Skripsi, Universitas Siliwangi.
- Ricklefs, M. (1998). *Sejarah Indonesia Modern*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Saputra, I. (2019, Januari-Juni). Resolusi Jihad : Nasionalisme Kaum Santri Menuju Indonesia Merdeka. *Jurnal Islam Nusantara*, 03, No. 01, 205-237.
- Sumatera-Bode. (1919, Juli 31). De Garoet Affaire. *Sumatera Bode*.
- Sumatera-Bode. (1920, Maret 27). De Leles-Zaak. *Sumatera-Bode*.
- Suminto, H. A. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES
- Suparjan, I. K. (2021, Februari). Politik Diplomasi Masa Revolusi Menuju Pengakuan Kemerdekaan Indonesia (1946-1949). *SOSIOHUMANIORA : Jurnal Ilmiah dan Humaniora*, 7, No. 1, 122-131.
- Untung, M. s. (2018). *Sejarah Sosial Pesantren Menurut Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*. Pekalongan: IAIN Pekalongan Press.
- Vorstenlanden, D. N. (1920, Februari 27). De Tjimareme-zaak.
- Widuatie, R. W. (2015, Desember). Konflik Politik dalam Pergerakan Sarekat Islam 1926. *Literasi*, 5 No.2, 216-232.
- Zada, K. (2017). Politik Perlawanan Muslim Cipari (Garut) Terhadap Radikalisme Gerakan Darul Islam. *ISTIQRO'*, 15, Nomor 02, 297-322.

